

Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordialisme di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan Versus Keindonesiaan (Studi Kasus Aceh, Papua, Bali, dan Riau)

Oleh:
Firman Noor¹

Abstract

This research explores, theoretically, the reasons behind the emergence of primordial sentiment in Indonesia in the era of democratization. The research indicates six factors that determine this phenomenon namely, the continuation of incorrect interpretation about the true meaning of Indonesia, the existence of formalistic understanding on the role of religion in the state, economical disparity, political injustice, and state domination in interpreting national symbols. In this regards, the research finds that mismanage in governing people and the repressive tendency of previous government as the trigger of the emergence of primordial sentiment in reformasi era.

Fenomena nasionalisme di Indonesia dengan segenap problematikanya saat ini merupakan sebuah bahan kajian yang menarik untuk diteliti secara mendalam. Salah satu aspek yang cukup penting adalah menyangkut hubungan antara nasionalisme dengan fenomena kebangkitan sentimen primordial di era demokratisasi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa semangat kembali kepada nilai-nilai primordial dirasakan makin tumbuh dan menguat setelah reformasi berlangsung. Berbagai fenomena yang terjadi di hampir berbagai wilayah baik di Aceh, Papua, Timor-Timur, dan berbagai daerah lainnya termasuk Riau, Manado hingga Bali memperlihatkan bagaimana nilai-nilai partikular dan identitas primordial serta “nilai-nilai lokal” makin memuncak dengan segenap ekspresinya (baik dalam bentuk sentimen etnis maupun keagamaan).

Fenomena ini patut diperhatikan sebab eksistensi nasionalisme, sebagai sumber semangat

untuk mempersatukan keragaman masyarakat dan seluruh teritorial bangsa dapat goyah ketika sentimen primordial, baik dalam ekspresi keetnisan maupun keagamaan, menguat dan menunjukkan ekspresi perlawanannya.

Selain itu, nasionalisme, sebagai sebuah cita-cita dan kesepakatan kolektif yang bersifat imajiner tentang masa depan yang lahir dari refleksi atas masa lalu dan masa kini, memang perlu dikelola, dirawat, dan diperbaharui agar tetap relevan pada setiap zaman. Bagi negara-bangsa seperti Indonesia yang demikian besar dan multikultural, kebutuhan akan pengelolaan, perawatan, dan pembaharuan terus-menerus atas imaji nasionalisme itu jelas menjadi penting adanya. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti mempertahankan sebuah falsafah dasar mengenai “kemauan untuk rela bersatu atas dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa depan di mana semangat kemanusiaan menjadi landasannya. Secara lebih spesifik dalam makna keindonesiaan hal itu dikaitkan dengan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi yang didampingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan”.

¹ Resume penelitian ini merupakan ringkasan dari laporan penelitian yang dikerjakan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari: Mochtar Pabottingi, Muridan S. Widjojo, Syafuan Rozi, Irine Hiraswari Gayatri, dan Firman Noor

Persoalannya bukan hanya karena pertumbuhan ide tentang nasionalisme itu pada mulanya memang cenderung bersifat elitis², melainkan juga karena dasar-dasar bagi nasionalitas itu sendiri relatif longgar, terutama karena dia harus dikonfirmasi dengan segenap unsur-unsur bangsa yang berbeda secara etnik, agama, daerah, dan ideologis. Sementara persoalan kesejarahan dan faktor-faktor kekinian, meski di satu sisi turut membentuk, di sisi lain berpotensi pula mengaburkan makna nasionalisme itu sendiri.

Terkait dengan fenomena kebangkitan gejala primordialisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era demokratisasi saat ini, tanpa mengecilkan arti faktor eksternal, penelitian ini akan terfokus pada persoalan hubungan antara pertumbuhan demokratisasi dan nasionalisme serta berkembangnya semangat primordialisme di Indonesia saat ini. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan yakni, *pertama*, melihat hubungan antara nasionalisme dengan demokratisasi dan kebangkitan sentimen primordial di Indonesia saat ini. Dalam hal ini akan dikaji secara teoritis pola hubungan antara ketiganya terutama keterkaitan antara nasionalisme dan demokratisasi, demokratisasi dan kebangkitan primordial, dan persoalan pengelolaan negara dengan keutuhan bangsa, di mana kesemuanya akan dikaitkan dengan kondisi nasion atau keindonesiaan saat ini. *Kedua*, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memunculkan semangat untuk menonjolkan identitas primordial (baik dalam konteks etnis maupun agama) dalam alam demokrasi saat ini.

Antara Demokratisasi dan Kebangkitan Sentimen Primordial

Dalam konteks Indonesia, penguatan sentimen primordial –yang kemudian memicu sentimen kedaerahan dan kesadaran politik baru di era demokratisasi– telah dimulai bahkan tak

² Smita G. Sabhlok, "Nationalism and Ethnicity and the Nation-State in South Asia", in *Nationalism and Ethnic Politics*, Vol. 8, No. 3, Autumn 2002, hlm. 27. Sejarah bangsa ini memperlihatkan bahwa rasa berbangsa tumbuh setelah terbentuknya negara. Sehingga perasaan kebangsaan sejatinya merupakan suatu hal yang dimulai dan disokong oleh negara dan elit bangsa untuk ditularkan ke seluruh penjuru nusantara. Sesungguhnya, hal ini merupakan fenomena yang wajar di berbagai negara dunia ketiga atau negara bekas jajahan, di mana gerakan nasionalisme itu tumbuh sejalan dengan proyek pemunculan negara-negara baru.

lama setelah Indonesia memasuki era reformasi. Dalam format keetnisan, sentimen primordial tercermin mulai dari upaya memasukan nilai-nilai primordial ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah administrasi pemerintahan, keinginan mendapatkan otonomi khusus, sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan, sentimen primordialisme terefleksikan, misalnya dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya "Perda Syariah" di beberapa daerah, maupun upaya menjadi sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Dengan tumbuhnya gejala-gejala tersebut, fenomena kebangkitan sentimen primordialisme telah menjadi warna tersendiri di era demokratisasi. Terkait dengan hal itu Baladas Ghosal menyatakan bahwa demokratisasi di Indonesia tampak seperti fenomena terbukanya kotak Pandora. Ghosal mengatakan "*the removal of the lid on politics has opened up a Pandora's box, fomented ethnic and religious conflicts and even encouraged separatism, thereby creating political and economic uncertainties*"³. Namun demikian, situasi ini bukanlah khas Indonesia mengingat situasi sejenis menggejala pula di banyak negara terutama pada negara-negara multi-etnis. Dalam studi mengenai kebangkitan primordial di negara-negara pecahan Uni Soviet, Kumar Rupesinghe sampai pada sebuah kesimpulan bahwa demokratisasi merupakan sebuah paradoks, di mana di satu sisi memberikan peluang bagi terlaksananya hak-hak politik rakyat, namun di sisi lain turut memicu kesadaran primordial, baik dalam bentuk kebangkitan etnis maupun fundamentalisme agama.⁴ Perkembangan yang ada tersebut seolah sejalan dengan prediksi beberapa pemerhati dan ahli politik termasuk Mark Juergensmeyer⁵, Karen Armstrong⁶, dan Samuel Huntington⁷ yang mengindikasikan bahwa fenomena kebangkitan primordial, baik

³ Baladas Ghosal, "Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia", dalam *Contemporary Southeast Asia* 26, no. 3 (2004): hlm. 506.

⁴ Kumar Rupesinghe, "Governance and Conflict Resolution in Multi-Ethnic Societies", dalam Kumar Rupesinghe and Valery A. Tishkov, *Ethnicity and Power in Contemporary World*, (Tokyo: United Nations University Press, 1996), hlm. 23.

⁵ Karen Armstrong, *The Battle For God*, (New York: Alfred Knopf, 2000).

⁶ Mark Juergensmeyer, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State*, (Berkeley: University of California Press, 1993).

⁷ Samuel P Huntington, "Clash of Civilization?". *Foreign Affairs*. Vol. 72, No. 3, Summer 1993.

dalam wajah keetnisan maupun keagamaan, merupakan hal yang tidak terelakan dewasa ini.

Dalam konteks transisi menuju demokrasi, secara teoritis, terdapat beberapa sudut pandang yang menjelaskan fenomena bangkitnya identitas primordial. Pada umumnya, kebangkitan sentimen primordial dilihat sebagai gejala yang terkait dengan persoalan tidak terakomodirnya keterwakilan kepentingan kelompok masyarakat tertentu, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Di sisi lain, fenomena ini juga dipicu oleh menguatnya rasa ketidakpastian akibat perubahan rezim yang berkuasa. Sementara itu, faktor globalisasi juga tidak dapat diabaikan. Perannya relatif paradoks, sebagai komponen yang memberikan kesadaran baru akan makna “keadilan”, “diskriminasi”, dan “kekhasan”, hingga sebagaimana yang diyakini oleh Rankin dan Goonawerdana, yaitu turut bertanggung jawab atas meluasnya kesenjangan ekonomi dan praktik diskriminasi politik dan budaya.

Dengan demikian, dapat dikatakan di sini bahwa terdapat “variabel antara” di antara hubungan demokratisasi dan kebangkitan sentimen primordial, di mana demokratisasi sejatinya merupakan pemicu yang mengondisikan terjadinya penguatan sentimen primordial yang sebelumnya telah dimatangkan oleh persoalan kesenjangan ekonomi, ketidaksiapan mengantisipasi perubahan institusional yang berjalan cepat, dan dampak dari represi politik dari rezim sebelumnya.

Faktor-Faktor Penyebab

Beberapa fenomena tersebut sejatinya menunjukkan adanya sebuah tantangan internal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini melihat beberapa faktor penyebab yang menjadi penting untuk dipahami. Hal ini tidak saja menjadi bagian dari upaya penyelesaian persoalan, namun juga menjadi sebuah pijakan awal bagi pembangunan sebuah sistem kebangsaan dan pemerintahan di kemudian hari. Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa kemunculan semangat primordial dalam konteks keindonesiaan pasca-Soeharto merupakan fenomena yang disebabkan oleh banyak faktor. Dengan kata lain, tidak ada satu faktor yang dapat menjawab situasi itu secara memuaskan.

Faktor-faktor tersebut adalah *pertama*, masih berlangsungnya interpretasi yang kurang tepat akan hakikat keindonesiaan. Bab III penelitian ini menjelaskan bahwa kesalahan memahami makna keindonesiaan yang bercirikan, antara lain: pluralisme, demokrasi, dan karakter republikan yang seharusnya menjadi sendi pemerintahan Indonesia, pada gilirannya tidak saja memicu kegagalan bangsa dalam mempertahankan makna kebangsaannya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh para pendiri bangsa, namun juga dalam konteks yang lebih konkret, yaitu menyebabkan salah urusan pemerintahan berlarut-larut. Berbagai eksperimen penyelenggaraan negara dan pemerintahan diinspirasi oleh penafsiran yang subjektif dan keliru mengenai hakikat republik.

Tampaknya penafsiran subjektif dan keliru atas hakikat republik inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya berbagai kebijakan distortif negara dan pemerintahan di berbagai bidang pada era Soekarno dan Soeharto, serta sebagian relatif masih berlanjut pada era pasca-Soeharto dewasa ini. Cara pandang para penyelenggara negara dan pemerintahan yang cenderung sentralistik, *mind-set* penyeragaman bagi bangsa yang amat beragam, serta pendangkalan ide persatuan menjadi sekadar “kesatuan teritori” —melalui konsep NKRI— adalah sebagian realitas salah urusan negara yang berdampak pada tetap termarginalisasinya daerah dan rakyat dalam proyek keindonesiaan.

Kedua, hadirnya formalisasi agama yang terekspresikan dalam bentuk aktivitas dan pemikiran religius yang tidak diarahkan pada penguatan keindonesiaan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab V, meski faktor keagamaan adalah elemen bagi keindonesiaan, namun upaya beberapa kalangan dewasa ini untuk menjadikan agama sebagai *payung yang membawahi* keindonesiaan kerap memicu perbenturan baik dalam tingkat konsep maupun gerakan. Akibatnya, situasi ini justru menjadi kontraproduktif bagi proyek keindonesiaan yang menyaratkan pluralisme dan toleransi. Masih maraknya aksi dan pemikiran keagamaan yang berkarakter formalistik dan keras saat ini, yang melingkupi hampir seluruh agama yang ada di Indonesia, pada dasarnya menunjukkan masih kuatnya kesadaran beragama secara formalistik di tanah air.

Ketiga, hadirnya sebuah negara yang memonopoli simbol-simbol kebangsaan atas nama kesatuan geografis, modernitas, dan industrialisasi. Hal ini di satu sisi memang merupakan salah satu konsekuensi dari perilaku negara dalam mempertahankan entitas negara-bangsa, namun manakala cara penguatannya menafikan egaliterianisme dan penghormatan terhadap beragam elemen etnis pendukung bangun kebangsaan, hasilnya justru adalah kondisi menyesakkan bagi sebagian kelompok primordial. Kondisi seperti inilah, seperti yang tergambarkan pada Bab IV, yang justru memicu problematika bagi eksistensi negara-bangsa itu sendiri. *Keempat*, berlangsungnya disparitas dan ketidakadilan ekonomi. Kesenjangan ekonomi ini menjadi landasan pembenaran bagi kelompok primordial tertentu yang terus mengalami proses pemiskinan kepada upaya mencari kembali kearifan lokal dalam menghadapi himpitan kehidupan. Upaya ini kerap kali justru memperkuat identitas primordial yang bersifat eksklusif dan lokal, yang pada gilirannya kerap berhadapan dengan eksistensi kebangsaan yang lebih besar.

Kelima, perubahan institusional pemerintahan. Perubahan institusional, yang berimplikasi pada berubahnya tatanan sosial, konstelasi kekuasaan, dan pola distribusi kesejahteraan, memicu *kekhawatiran* sekaligus *peluang* bagi kelompok-kelompok primordial. Kekawatiran itu muncul terutama terkait dengan potensi berubahnya status kedudukan kelompok primordial tertentu. Dalam konteks inilah kebangkitan sentimen primordial hadir sebagai upaya mempertahankan kedudukan politik, status sosial, dan juga ekonomi yang mulai terancam. Sementara dalam konteks terciptanya “peluang”, terutama terkait dengan relaksasi pemerintahan pusat. Dalam hal inilah perubahan institusional memberikan peluang bagi bangkitnya sebuah kesadaran primordial sebagai respon makin terbukanya kesempatan nilai-nilai primordial dalam memengaruhi kebijakan di daerah.

Keenam, ketimpangan keterwakilan politik dan budaya. Ketidakproporsionalan politik dan budaya turut memainkan peran penting dalam menciptakan sebuah frustrasi politik, pengabaian keterwakilan budaya, dan secara konkret memperlambat perbaikan kehidupan. Hal-hal inilah yang kemudian memicu munculnya fragmentasi politik atas dasar primordial, yang

kemudian biasanya disusul dengan tumbuhnya kesadaran primordial kelompok yang mengalami marginalisasi. Dalam kondisi itulah, demokratisasi yang kemudian terjadi di Indonesia merupakan jembatan yang memberikan peluang bagi banyak pihak, terutama komunitas primordial untuk memahami kembali hakikat keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas yang khas, sekaligus mendefinisikan kembali kedudukan mereka dalam entitas keindonesiaan.

Dari pembahasan di atas penelitian ini secara umum menemukan bahwa faktor-faktor penyebab itu membentang dari mulai persoalan kognitif-intepretatif, baik dalam konteks memaknai hakikat kebangsaan dan keagamaan, persoalan struktural ekonomi, perubahan kelembagaan, peran negara hingga pada persoalan keterwakilan politik dan budaya. Namun demikian, beberapa faktor yang telah diangkat oleh penelitian ini merupakan temuan teoritis yang patut untuk diuji dan dikembangkan pada penelitian lapangan di tahun-tahun berikutnya.

Beberapa Kecenderungan

Meskipun faktor-faktor tersebut dalam batas-batas tertentu masih melekat kuat, namun sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II penelitian ini melihat adanya potensi bagi bangsa untuk mempertahankan itu dari dua kecenderungan, yang dapat teramati dari fenomena kebangkitan sentimen primordial di beberapa daerah.

Kecenderungan *pertama* adalah fakta bahwa ekspresi kebangkitan primordial terjadi lebih sebagai upaya “pemulihan keterwakilan” ketimbang upaya serius “melepaskan diri” dari NKRI. Hingga saat ini dapat dikatakan hanya Aceh dan Papua saja yang terlihat serius memiliki tujuan konkret yang jelas, yakni kemerdekaan. Upaya disintegrasi yang dilakukan oleh kelompok separatis di kedua wilayah itu tidak saja sekadar wacana, namun telah sampai pada detail konkret implementasinya. Sementara di daerah lain, meski telah masuk dalam wilayah yang lebih kuat dari sekadar pemulihan keterwakilan, kebangkitan sentimen primordial dapat dikatakan belum mengarah ke arah merdeka secara serius. Baik di Riau, Bali maupun Minahasa hal itu masih bersifat wacana dan dalam praktiknya tidak mendapat dukungan yang meluas. Di samping itu, ketiadaan sebuah kelompok elit dan organisasi

yang solid menyebabkan wacana yang dikembangkan, termasuk dalam konteks RMS, bersifat terbatas. Dalam perkembangannya wacana merdeka terutama di Riau dan Minahasa lebih ditafsirkan sebagai kemerdekaan dari kemiskinan, kebodohan atau pun diskriminasi agama.

Kecenderungan *kedua* adalah bahwa ekspresi kebangkitan sentimen primordial itu secara umum masih disalurkan dengan cara-cara legal-formal atau masih dalam batas aturan main bernegara, ketimbang melalui jalur-jalur inkonstitusional dan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penggiat kebangkitan sentimen primordial itu masih mengakui institusi politik dan eksistensi pemerintah yang sah. Dalam beberapa kasus kebangkitan primordial yang muncul di era demokratisasi, praktis hanya Aceh dan Papua saja yang relatif menggunakan cara-cara inkonstitusional dan kekerasan, di mana kasus penggunaan cara-cara kekerasan di Aceh terlihat lebih kolosal dengan skala pembunuhan yang lebih luas. Ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada, baik karena praktik politik masa lampau yang bersifat opresif maupun tawaran ideologi dan kepentingan yang dipandang sulit untuk disalurkan pada sistem yang ada, menyebabkan kelompok-kelompok primordial hal ini lebih memilih jalur-jalur ekstra-parlementer bahkan bersenjata.

Sementara itu, di sisi lain, pilihan bersenjata tampaknya bukan sebuah pilihan yang masuk akal bagi penggerak “kemerdekaan” di Riau, Maluku atau pun Minahasa, mengingat sangat rendahnya kemampuan kelompok ini untuk memobilisir massa apalagi menciptakan kelompok bersenjata. Sebaliknya, para penggerak *Ajeng Bali* meyakini bahwa cara-cara damai melalui perubahan bertahap dan masuk ke dalam sistem merupakan pilihan yang terbaik bagi mereka. Dengan kesadaran pragmatis masyarakat Bali bahwa kehidupannya ditentukan oleh pariwisata yang menyaratkan kedamaian, keamanan, dan ketertiban; maka pilihan untuk menggunakan cara-cara kekerasan akan sulit mendapat dukungan yang meluas.

Di sisi lain, dalam konteks bangkitnya sentimen keagamaan dapat dilihat bahwa ekspresi primordial itu diwujudkan dalam bentuk Perda, setelah melalui sebuah proses yang legal-konstitusional. Cara-cara parlementariat menjadi ajang diejawantahkannya sentimen primordial itu

beriringan dengan kebutuhan praktis daerah tersebut untuk “membersihkan” wilayahnya dari kemaksiatan dan penurunan nilai-nilai moral. Meski dalam konteks keagamaan ini juga terlihat langkah-langkah radikal dan kecenderungan kekerasan dalam mengupayakan kepentingannya, namun hal itu tidak menutupi kenyataan yang lebih besar di mana sikap menahan diri, mengutamakan dialog, dan menggunakan jalur-jalur legal, lebih meluas digunakan oleh umat Islam dalam memperjuangkan kepentingannya.

Dengan melihat kecenderungan model pengekspresian kebangkitan primordial di atas dapat disimpulkan bahwa cara-cara institusional masih dominan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini memperlihatkan dua kemungkinan, yakni di satu sisi kemampuan untuk melakukan perlawanan dan separatisme dalam makna yang komprehensif atas nama primordialisme masih demikian rendah. Di sisi lain, juga adanya oleh kenyataan bahwa upaya melakukan sebuah perubahan secara radikal tidak mendapat dukungan penuh dari rakyat setempat.

Dalam situasi seperti ini, maka fenomena kebangkitan primordial yang ada di Indonesia dapat dikatakan masih dalam situasi yang wajar sebagai sebuah aspek dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa fondasi kebangsaan Indonesia tidak seutuhnya lemah. Di samping itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang bersifat diskriminatif, sebagai pemicu gerakan separatis, mulai tereduksi dalam konteks politik saat ini.

Penutup

Meskipun kecenderungan di atas memperlihatkan sebuah optimisme, namun hal ini tidak berarti bahwa Indonesia telah sampai pada tahap aman dalam konteks mempertahankan eksistensi kebangsaannya. Karena kebangsaan itu sejatinya tidak saja merupakan sebuah produk zaman yang perlu terus dibina keabsahannya di setiap masa, namun juga karena beberapa potensi disintegrasi yang dapat menyebabkan runtuhnya bangsa tidak seutuhnya hilang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah upaya institusional dan upaya kultural dalam bentuk kesadaran untuk menjawab situasi tersebut di era reformasi ini.

Penelitian ini menawarkan beberapa alternatif penyelesaian, terkait dengan masih adanya peluang bagi tegaknya keindonesiaan di

era ketika kebangkitan primordial deras terasakan. Meskipun disadari bukan merupakan sebuah tawaran yang final, namun penelitian ini melihat bahwa penyelesaian yang ditawarkan merupakan bentuk minimal, yang harus ada manakala upaya mempertahankan keindonesiaan dalam semangat keragaman primordial ingin dirajut. Penelitian ini menyodorkan model *deliberative democracy* sebagai salah satu jawaban. Salah satu keunggulan dari demokrasi deliberatif adalah bahwa konsep demokrasi ini menempatkan masyarakat benar-benar sebagai subjek bagi pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, baik masyarakat dan pemerintah memiliki hak untuk mengemukakan pandangan-pandangan yang mendasari pilihan politik secara utuh dan di sisi lain memiliki hak untuk didengar oleh pemerintah dan kelompok lain.

Situasi ini, pada gilirannya akan mengembangkan sebuah budaya politik yang mengedepankan dialog atau musyawarah meski tidak berarti harus mencapai mufakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gutmann dan Thompson bahwa target minimal dari pengembangan demokrasi deliberatif adalah hadirnya semangat kebersamaan dengan semua elemen yang ada berada dalam sebuah komunitas politik yang sama sehingga dapat memahami aspirasi dan alasan di balik pilihan-pilihan politik kelompok lain. Hingga mungkin saja sebuah perbedaan pandangan yang mengkristal saat ini, dapat lebih melunak dan terakomodir di kemudian hari mengingat elemen-elemen yang turut dalam proses pembuatan kebijakan dapat memahami hakikat pemikiran kelompok lainnya.⁸

Dalam konteks Indonesia saat ini, demokrasi deliberatif berpotensi membuka dialog dan saling pengertian antara elemen-elemen anak bangsa dan juga antara masyarakat dan pemerintah. Kondisi ini pada gilirannya secara normatif tidak saja dapat menutupi rasa teralienasi dan berbeda antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya, namun juga akan mendorong seluruh elemen bangsa untuk dapat lebih bekerja sama. Di samping itu, situasi ini akan turut menopang upaya pembentukan pemerintahan yang transparan dan peduli terhadap kepentingan dan eksistensi seluruh elemen bangsa. Hingga pada akhirnya kebijakan yang dirasakan diskriminatif

dan tidak sensitif dapat semakin dihindari. Dalam situasi politik seperti inilah, maka kehidupan demokrasi yang diliputi oleh semangat penghargaan terhadap seluruh elemen bangsa, termasuk kelompok minoritas, dalam wadah keindonesiaan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, serta menjadi jembatan emas bagi perbaikan kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini melihat bahwa makna kebangsaan yang *genuine* merupakan syarat mutlak yang harus dibangun manakala bangsa ini menginginkan keberadaannya terus berlangsung. Secara spesifik, hal ini berarti mengembalikan tatanan kebangsaan pada semangat persatuan yang dilandasi ketulusan untuk hidup bersama dalam keragaman dan pemulihan model pemerintahan yang bersifat demokratis dan non-sentralistis. Salah satunya adalah terkait dengan peranan dan kemampuan negara dan atau pemerintah dalam merasionalisasikan ide tentang nasionalisme. Hal ini menjadi kebutuhan yang begitu penting untuk mempertahankan komitmen kolektif atas Republik, selain keperluan akan pengelolaan, perawatan, dan pembaharuan terus-menerus atasnya. Masalahnya, pemerintah yang berkuasa di negeri ini cenderung melestarikan “salah urus” atas negara ketimbang mengondisikan penyelenggaraan negara yang memungkinkan nasionalisme dan semangat keindonesiaan terkelola sebagai aset dan kekuatan kolektif dalam menghadapi persaingan global.

Sementara itu, terkait dengan masalah keagamaan dalam keindonesiaan, penelitian ini menawarkan upaya membangun gerakan spiritualitas multikultural dan penciptaan ruang publik yang adil bagi seluruh kelompok agama. Untuk itu diperlukan itikad baik dari seluruh golongan agama untuk membina dialog dan membangun jembatan pengertian untuk mencari titik temu. Secara konkret hal itu dapat berarti saling bertoleransi yang termanifestasikan, baik dalam bentuk kebijakan publik, materi pendidikan, ekspresi seni, dan jurnalisme multikultural. Dalam hal ini tidak dapat dipinggirkan peran seniman, guru, jurnalis di samping kaum rohaniwan, dan aktivis LSM, untuk mengangkat tema-tema perdamaian, toleransi, serta pluralisme dalam wadah kebangsaan, agar elemen keagamaan dapat memainkan peran sebagai salah satu soko guru penguat keindonesiaan.

⁸Amy Gutmann dan Dennis Thompson, *Why Deliberative Democracy?*, (New Jersey: Princeton University Press, 2004), hlm. 3-7.

Terlepas dari sebuah usulan hipotetik di atas, satu hal yang tampaknya patut dikedepankan adalah bahwa makna keindonesiaan saat ini di masa datang adalah keindonesiaan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini berarti segenap aspek-aspek yang dibutuhkan oleh manusia Indonesia sebagai warga negara haruslah terpenuhi, termasuk kebutuhan untuk mempertahankan kekhasan yang positif dan kondusif bagi tegaknya rasa kebersamaan dalam naungan keindonesiaan. Dengan ini, maka sentimen primordialisme diharapkan dapat berjalan koeksisten dengan keindonesiaan sehingga mampu mempertahankan denyut pluralisme sebagai nadi bagi kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Sabhlok, Smita G. 2002. "Nationalism and Ethnicity and the Nation-State in South Asia". In *Nationalism and Ethnic Politics*. Vol. 8. No. 3. Autumn.
- Ghosal, Baladas. 2004. "Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia". *Contemporary Southeast Asia* 26. No. 3.
- Gutmann, Amy, dan Dennis Thompson. 2004. *Why Deliberative Democracy?*. New Jersey: Princeton University Press.
- Rupesinghe, Kumar, 1996. "Governance and Conflict Resolution in Multi-Ethnic Societies". Dalam Kumar Rupesinghe and Valery A. Tishkov. *Ethnicity and Power in Contemporary World*. Tokyo: United Nations University Press.
- Horowitz, Donald L. 1994. "Democracy in Divided Societies". Dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner. *Nastionalism, Ethnic Conflict and Democracy*. Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Amstrong, Karen. 2000. *The Battele For God*. New York: Alfred Knopf.
- Juergensmeyer, Mark. 1993. *The New Cold War?, Religious Nationalism Confronts the Secular State*. Berkeley: University of California Press.
- Huntington, Samuel P. 1993. "Clash of Civilization?" *Foreign Affairs*. Vol.72. No.3. Summer.